



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ~~10~~ TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur pemerintahan pilihan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan

- b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.

- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

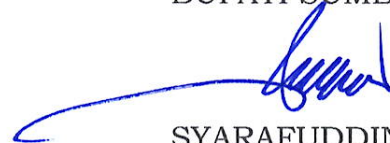
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 82 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 82 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025
BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 101 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen awal perencanaan periode 5 (lima) tahun, yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang bersifat indikatif dan menggambarkan rencana pelayanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini juga menampilkan peranan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung Upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, berpedoman pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis sektor peternakan baik di tingkat global, nasional, regional, maupun lokal demi menjamin kesinambungan pembangunan peternakan terutama dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2026-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra-PD Tahun 2025-2029 dilandasi oleh kerangka hukum yang komprehensif, sistematis, dan hirarkis, guna memberikan legitimasi formal dan arah teknokratik dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, akuntabel, partisipatif, dan berbasis bukti. Kerangka hukum ini memastikan bahwa seluruh proses penyusunan Renstra selaras dengan prinsip-prinsip good governance, serta mendukung sinkronisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Dasar hukum penyusunan dimaksud mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga regulasi teknis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang ada oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran arah dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah terkait Urusan Pemerintahan Umum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1. Menyediakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan, serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah internal Kabupaten Sumbawa, perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan Pembangunan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pada Bab II ini terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu : (1) gambaran

pelayanan umum perangkat daerah; dan (2) permasalahan dan isu strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan (4) Kelompok Sasaran Pelayanan dan Mitra Layanan Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan hasil penjarangan aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa merupakan Dinas Tipe A, mengalami restruktur organisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, restrukturisasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan melalui pemetaan rumpun urusan dan kewenangan. Perubahan dan penataan struktur organisasi merupakan upaya reformasi birokrasi yang lebih produktif, efektif, efisien, profesional, akuntabel, transparan dan bebas dari KKN.

Tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
2. Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut : (a) perumusan kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (d) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diatur dalam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas :

- a. Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Kesehatan Hewan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengawasan Izin Usaha

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing pejabat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan ternak dan pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, sarana prasarana dan pengawasan izin usaha peternakan, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Tugas sekretaris Dinas adalah melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah rincian tugas Sekretaris Dinas :

- a. Merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. Mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i. Menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- j. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. Melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- m. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan

- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan

Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbibitan ternak dan pakan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- d. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- e. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;

- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- i. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penjaminan peredarab, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- j. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- k. Melaksanakan kegiatan pemetaan dan pengelolaan potensi genetik ternak sumbawa dan potensi wilayah sumber bibit;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan, kastrasi dan pembibitan ternak;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan budi daya pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan dan integrasi ternak;
- n. melaksanakan pengadaan mani beku dan menginventarisir hasil inseminasi buatan;
- o. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya genetik hewwan;
- p. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- q. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- r. memfasilitasi penyediaan sarana penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- s. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- t. melaksanakan identifikasi wilayah pengembangan budidaya pakan hijauan dan kawasan peternakan berdasarkan potensi komoditi;
- u. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
- v. melaksanakan seleksi, penilaian dan standardisasi mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
- w. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- x. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan,

standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan dan hijauan pakan ternak; dan

- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan

Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana peternakan dan pengawasan izin usaha peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan memiliki rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- b. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- e. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;

- f. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan serta penatausahaan penertiban dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- g. Melaksanakan pemetaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada kelompok usaha peternakan dalam hal manajemen, teknologi dan permodalan;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok usaha peternakan dalam hal manajemen, teknologi dan permodalan;
- k. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- l. Melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan; serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- m. Melaksanakan penyediaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- n. Menyelenggarakan kegiatan identifikasi potensi, daya tampung, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan kawasan peternakan;
- o. Menyiapkan bahan pertimbangan penetapan kawasan sebagai kawasan produksi peternakan dan pengukuhan lar;
- p. Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- q. Melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, pembinaan investasi dan pembiayaan peternakan;
- r. Melaksanakan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- s. Melaksanakan pengawasan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- t. Melaksanakan pengawasan izin usaha fasilitas pemeliharaan, izin usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- u. Melaksanakan pengawasan izin usaha pengecer obat hewan;
- v. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan;
- w. Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan hygiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- b. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- e. Menyusun, merancang, mengembangkan membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pendampingan dan pengawasan unit usaha hewan dan produk hewan;
- f. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penerapan unit kesejahteraan hewan, penanggulanagn bencana non alam yang bersifat zoonosis dan penanggulangan pasca bencana alam di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan, penetapan pemenuhan persyaratan reknsis, dan pengujian laboratorium kesehawan masyarakat veteriner;
- h. Melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan dan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- i. Melaksanakan penerapan teknis higiene sanitasi dan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan seperti tempat budidaya, tempat produksi pangan asal hewan, produksi produk hewan nonpangan, Rumah Potong Hewan, tempat pengumpulan dan penjualan, pengangkutan;

- j. Melaksanakan pengawasan unit usaha hewan dan produk hewan seperti rumah potong hewan, tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal hewan lainnya, tempat produksi produk hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan penjualan;
- k. Melaksanakan tindakan pencegahan pemotongan ternak betina produktif;
- l. Melaksanakan identifikasi dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai dengan kewenangan;
- m. Melaksanakan penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- n. Melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- o. Melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- p. Melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan menjalankan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- e. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- f. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten, serta jasa laboratorium;
- g. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan dan zoonosis serta penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten, serta jasa laboratorium;
- j. Melaksanakan kegiatan pembinaan laboratorium kesehatan hewan;
- k. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- l. Melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan;
- m. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha obat hewan tingkat pengecer;
- n. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten, serta jasa laboratorium;
- o. Menyiapkan bahan rekomendasi kuota dan surat izin keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak;
- p. Melaksanakan sistem pelayanan kesehatan hewan di klinik hewan, pusat kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan;
- q. Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan;
- s. Melaksanakan pengawasan terhadap fisik penyimpanan dan peredaran obat hewan;
- t. Melaksanakan survei, pengkajian, inovasi dan penerapan teknologi pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, dan pelayanan jasa medik veteriner, pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan, serta jasa laboratorium;
- u. Melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan dan zoonosis;

- v. Melaksanakan pemetaan dan visualisasi penyakit hewan serta pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan peneguhan diagnosa;
- w. Melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah;
- x. Melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan kebijakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :

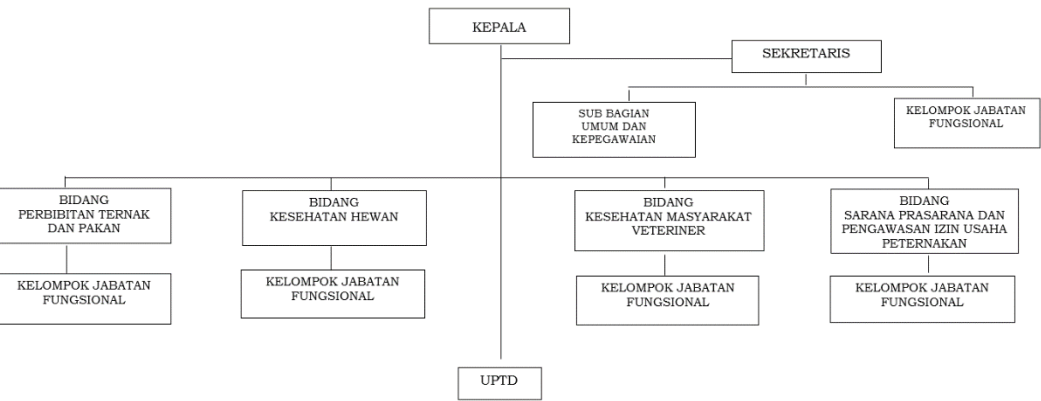
- 1) penyusunan program kerja UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
- 2) penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
- 3) penyusunan perencanaan kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
- 4) pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
- 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan kerbau sumbawa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi menyelenggarakan fungsi :

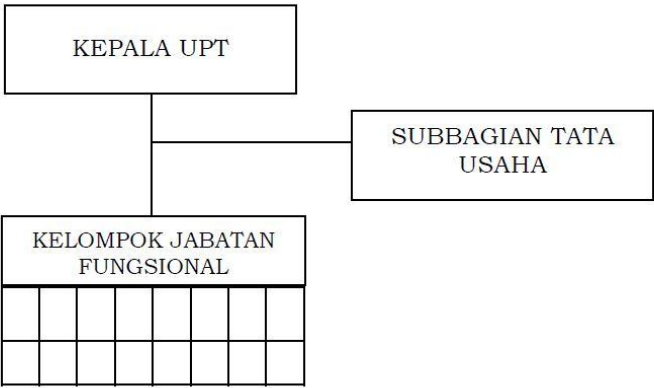
- 1) penyusunan program kerja UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi;
- 2) penyusunan bahan kebijakan pembibitan dan pengembangan kerbau sumbawa;
- 3) pelaksanaan pengembangan pembibitan kerbau sumbawa;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pembibitan kerbau sumbawa; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

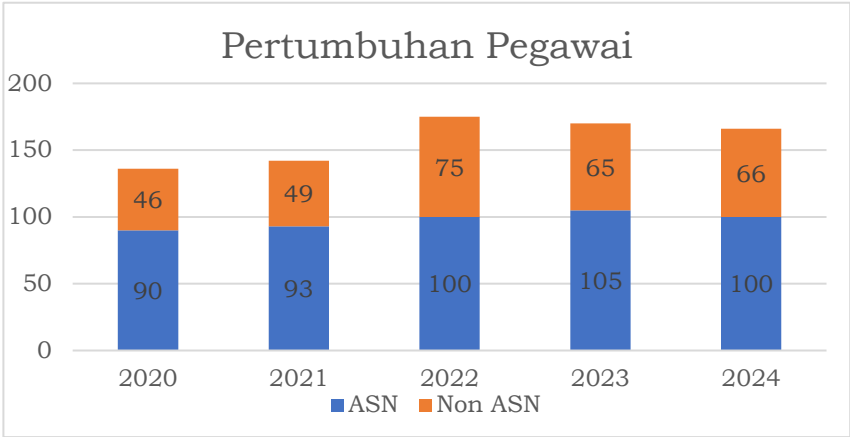
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Adapun rincian karakteristik sumber daya manusia pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

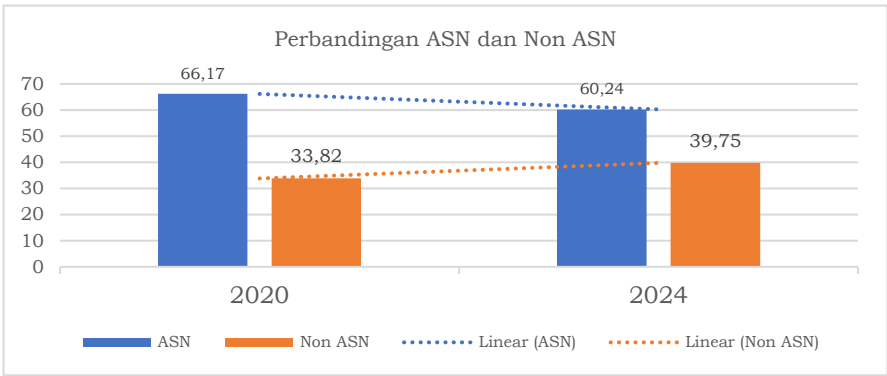
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pegawai	136	142	175	170	166
	ASN	90	93	100	105	100
	Non ASN	46	49	75	65	66
2	ASN menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	62	66	68	68	64
	Perempuan	28	27	32	36	36
3	Non-ASN menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki	32	33	42	44	43
	Perempuan	14	16	33	21	21
4	Pegawai ASN menurut Umur:					

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Usia 20-29 tahun		1	3	5	5
	Usia 30-39 tahun	4	9	16	20	20
	Usia 40-49 tahun	31	32	32	35	34
	Usia 50-54 tahun	55	51	49	45	41
5	ASN menurut Pendidikan:					
	SLTP			1	0	0
	SMA Sederajat	24	23	20	19	18
	Diploma (D1-D3)	5	5	9	10	9
	S1	57	60	65	70	67
	S2	4	5	5	6	6
	S3					
6	No-ASN menurut Pendidikan:					
	SD	2	2	2	0	2
	SMP Sederajat	2	1	2	1	2
	SMA Sederajat	12	14	13	14	13
	Diploma (D1-D3)	3	2	2	6	6
	S1	26	31	40	43	40

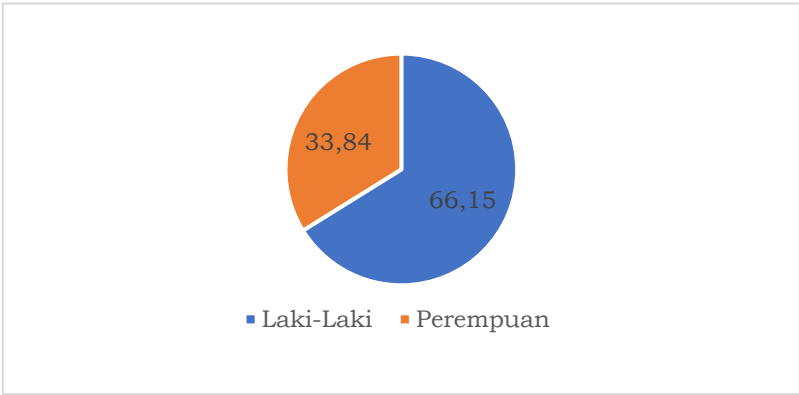
Secara umum jumlah Pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024 sejumlah 30 Orang atau 22,05%, peningkatan terbesar pada pegawai non ASN sebesar 20 orang sedangkan ASN sebesar 10 orang. Grafik Pertumbuhan pegawai tahun 2020 – 2024.



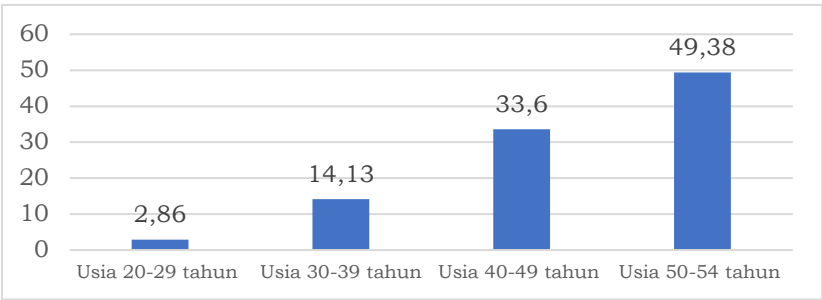
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 – 2024



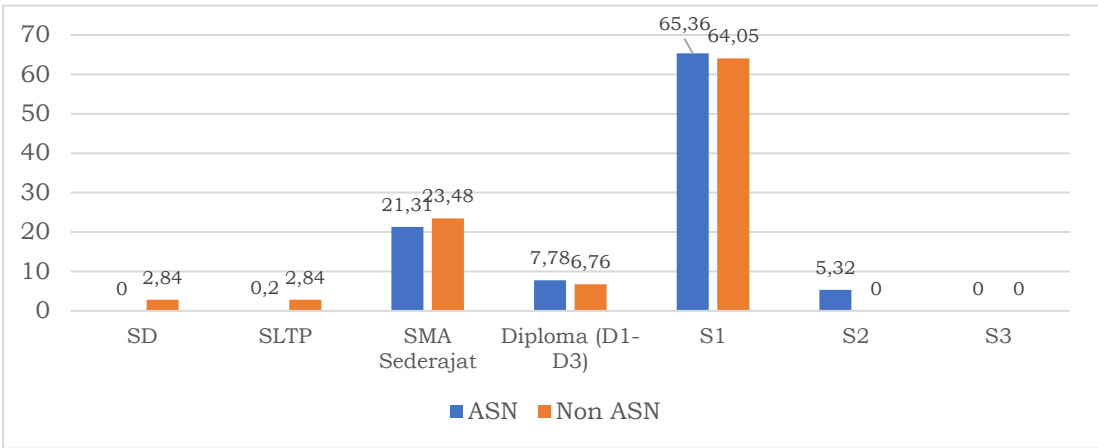
Gambar 2.2 Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024.



Gambar 2.3 Komposisi Gender Pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 -2024.



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan umur Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 -2024



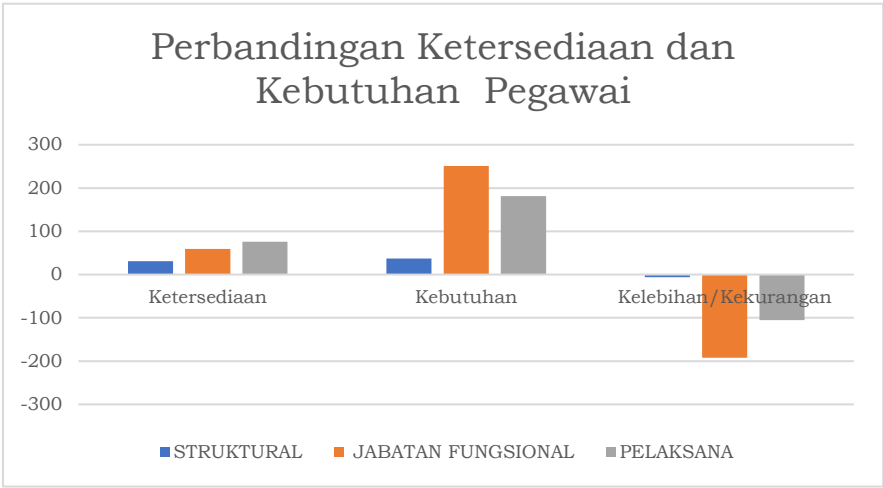
Gambar 2.5 Komposisi Pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 -2024

Untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme sumberdaya manusia aparatur yang memadai, penentuan kebutuhan pegawai harus berdasarkan beban kerja beban kerja. Analisis beban kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jabatan	Pemangku Jabatan			ABK	Kelebihan/ Kekurangan
		ASN	Non ASN	Jumlah		
I	STRUKTURAL	31	0	31	37	-6
1	Kepala dinas	1	0	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	1	0
3	Kepala Bidang Perbibitan dan Pakan	1	0	1	1	0

No.	Jabatan	Pemangku Jabatan			ABK	Kelebihan/ Kekurangan
		ASN	Non ASN	Jumlah		
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	1	0	1	1	0
5	Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan	1	0	1	1	0
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	0	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1	1	0
8	Kepala UPTD	15	0	15	15	0
9	Kepala Tata Usaha (UPT)	9	0	9	15	-6
II	JABATAN FUNGSIONAL	40	19	59	251	-192
1	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	0	1	3	-2
2	JF Perencana	2	0	2	3	-1
3	JF Arsiparis	0	0	0	3	-3
4	JF Pranata Komputer	0	0	0	3	-3
5	JF Pranata SDM Aparatur	0	0	0	3	-3
	JF Analis Kebijakan	2	0	2	3	-1
6	JF Pengawas Bibit Ternak	8	0	8	71	-63
7	JF Pengawas Mutu Pakan	0	0	0	63	-63
8	JF Medik Veteriner	24	19	43	85	-42
9	JF Paramedik Veteriner	3	0	3	14	-11
III	PELAKSANA	29	47	76	181	-105
1	Pengolah Data dan Informasi	12	28	40	103	-63
2	Telaahan teknis kebijakan	1	9	10	30	-20
3	Pengadministrasi Perkantoran	13	4	17	34	-17
4	Operator layanan Operasional	1	4	5	10	-5
5	Pengelola Umum Operasional	2	2	4	4	0
	TOTAL	100	132	232	469	-237

Berdasarkan Analisis Beban Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat kekurangan pegawai sebesar 64,60% yang terdiri dari pada Jabatan Struktural sebesar 1,21%, Jabatan Fungsional sebesar 76,49% dan Jabatan Pelaksana sebesar 22,38% sehingga interpretasi terhadap beban kerja pada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dinyatakan bahwa beban kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemangku Jabatan maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kelebihan beban kerja.



Gambar 2.3 Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

2.1.2.2 Sumber Daya Unit Kerja

UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berjumlah 15 yang merupakan UPT Kelas A berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2021. Berikut daftar UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

- a. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer.
- b. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara.
- c. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu.
- d. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk.
- e. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok.
- f. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge.
- g. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang.
- h. UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.
- i. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee.
- j. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas
- k. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh.
- l. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar.
- m. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu.

- n. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung.
- o. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka.

2.1.2.3 Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

1. Sarana Prasarana Pendukung Peternakan

Penyediaan sarana prasarana pendukung peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa mendukung upaya peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan peternak. Penguatan ketersediaan sarana prasarana peternakan juga berperan untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna serta menyediakan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan hewan untuk mendorong produktivitas ternak.

Ketersediaan sarana prasarana peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan tahun 2024 berupa Klinik hewan sebanyak 1 unit, UPT Perbibitan Kerbau 1 unit, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebanyak 16 unit, Laboratorium Kesehatan Hewan sebanyak 4 unit, Rumah Potong Hewan sebanyak 7 unit, Holding Ground 1 unit, dan Pasar Hewan Bangkong 1 unit.

2. Inventaris Tanah

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris tanah dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

NO	Jenis/ Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang tanah	Bidang	33	33	33	33	34
2	Luas Bidang tanah	M2	437.157	437.157	437.157	437.157	437.857

Tabel 2.5 Jumlah Bidang dan Luas Bidang Tanah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024

3. Inventaris Peralatan dan Mesin

Daftar inventaris peralatan dan mesin pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diadakan pada tahun 2020-2024 terdiri dari peralatan peternakan pemeriksaan dan pengobatan hewan sebanyak 86 unit, peralatan studio sebanyak 4 unit, peralatan kantor sebanyak 45 unit. PC, laptop, scanner dan printer total 43 unit, dan kendaraan dinas sebanyak 31 unit.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.1.3.1 Indikator Kinerja Utama

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa melalui pelaksanaan Renstra tahun 2021-2024 yaitu meningkatnya kategori nilai AKIP dengan pencapaian target renstra 100% dengan target kategori nilai A dan realisasi kinerja memperoleh kategori nilai A) dan meningkatnya populasi ternak dengan pencapaian target renstra mencapai 153,50% dari target 2%.

Gambaran pencapaian sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Realisasi Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kategori Nilai AKIP DPKH	Realisasi Capaian	A	A	A	BB	A
		Rasio Capaian	100	100	100	83,09	100
2	Laju Pertumbuhan Populasi Ternak	Realisasi Capaian	-6,9	-7,64	1,37	3,4	3,07
		Rasio Capaian	-690	-764	137	160	153,5

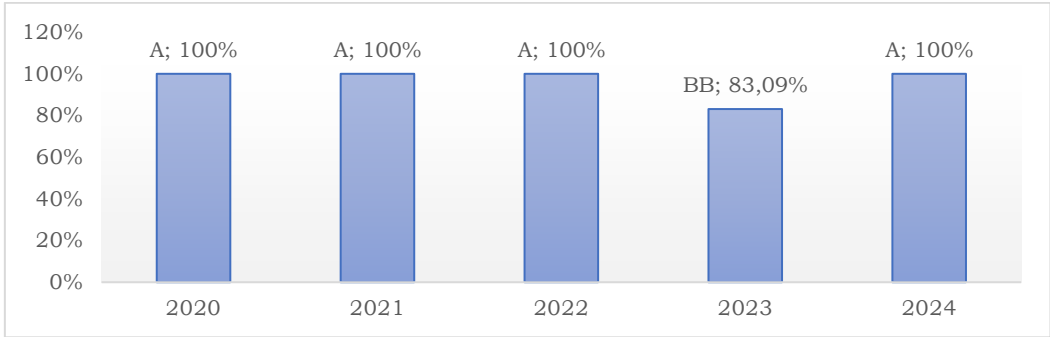
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Realisasi dan Rasio Capaian Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa didukung oleh realisasi kinerja beberapa indikator. Analisa capaian kinerja disajikan sebagai berikut :

1. Nilai AKIP DPKH

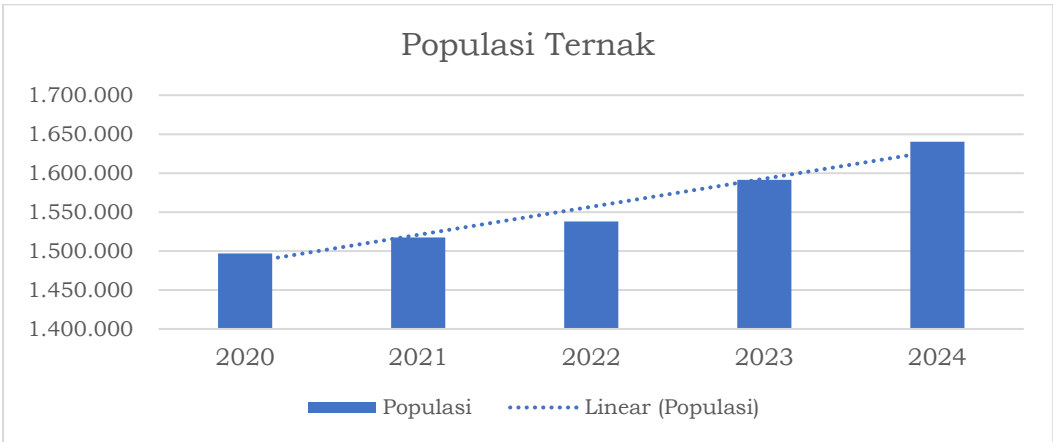
Program/kegiatan ditujukan untuk menunjang pencapaian pernyataan kinerja pelayanan peningkatan katagori nilai SAKIP terdiri kegiatan yang mencakup 1 program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perencanaan penganggaran dan evaluasi, rapat-rapat koordinasi baik ditingkat dinas, maupun dengan semua jajaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi barang/asset serta urusan penunjang urusan pemerintahan lainnya

Peningkatan nilai AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan selama 5 (lima) Tahun terakhir 2020-2024 hanya terjadi peningkatan nilai sebesar 0,185, hal ini disebabkan pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai yang sangat besar -6,27 hal ini menyebabkan penurunan Kategori nilai dari A menjadi BB.



Gambar 2.7 Grafik Persentase Capaian terhadap Target Kategori Nilai AKIP DPKH Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

2. Peningkatan Populasi Ternak



Gambar 2.8 Grafik Populasi Ternak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

Pertumbuhan populasi ternak 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik) menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 9,56% atau terjadi pertumbuhan pertahun hanya sebesar 1,91 %. Pada ternak sapi mengalami Pertumbuhan 13,40 %, kerbau 4,86 %, kuda -17,65%, kambing -24,41%, domba 15,59%, babi -16,05, ayam buras -14,04 %, ayam ras pedaging 15,46 %, ayam ras petelur -40,05 dan itik – 8,56. Sedangkan pada Rumah Tangga Kepemilikan Ternak (RTP) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 meningkat sebesar 3,18% atau bertambah setiap tahun hanya sebesar 0,64%. Penurunan RTP terbesar terjadi pada pemelihara/peternak ayam ras petelur sebesar -49% dan kuda sebesar -24%.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024, disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus	%	22,23 %	22,58%	- 1.713%	96,17 %	107,9 %

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyakit Hewan Menular						
2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	83,33 %	100%	100%	100%	100%

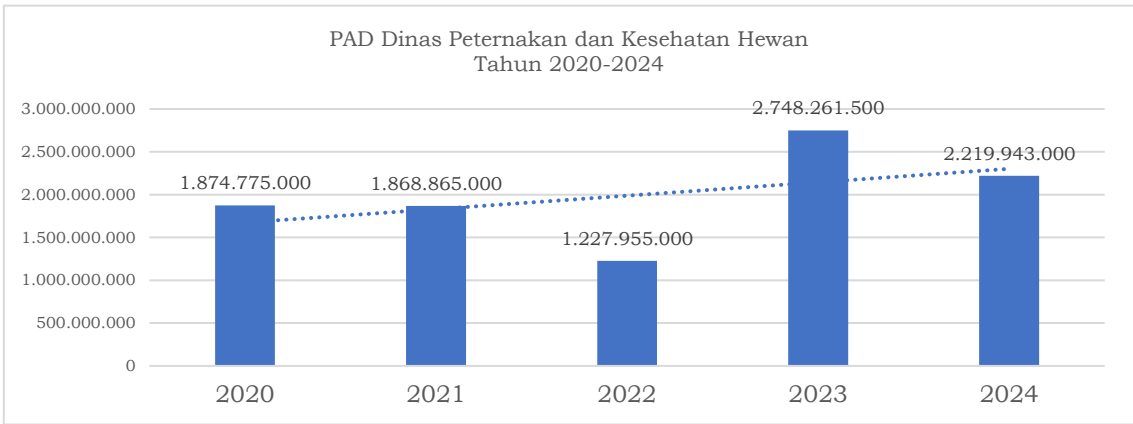
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Realisasi dan Rasio Capaian Tahun 2020-2024

2.1.3.3 Indikator Kinerja Lainnya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Utama dan indikator kinerja kunci, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan indikator kinerja yang tersusun dalam perjanjian kinerja pegawai berjenjang. Adapun indikator kinerja dan realisasi kinerja masing-masing bidang dirincikan pada bagian lampiran. Analisa capaian kinerja disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Subsektor Peternakan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa melalui pemakaian kekayaan dan aset daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan fisik, pengambilan spesimen, pemeriksaan laboratorium dan peneguhan diagnosa pada kegiatan lalu lintas ternak, kegiatan suci hama, penyewaan kandang di lokasi holding ground, serta kegiatan pelayanan kesehatan hewan pada klinik hewan dan unit pelaksana teknis puskesmas di tingkat kecamatan. Retribusi rumah potong hewan melalui kegiatan pemeriksaan hewan untuk memastikan hewan yang disembelih dan daging yang akan beredar melalui RPH memenuhi kaidah aman sehat utuh dan halal (ASUH).



Gambar 2.9 PAD Dinas Peternakan dan Keswan Tahun 2020-2024

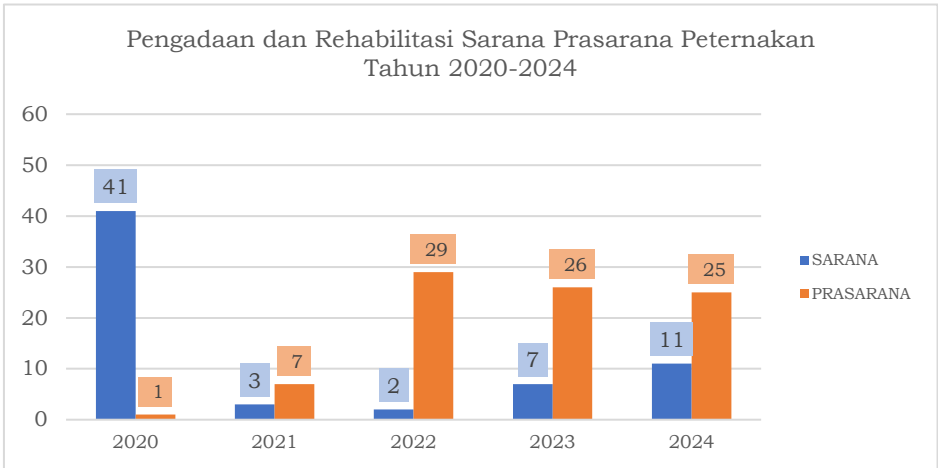
Total pendapatan asli daerah melalui Dinas Peternakan tahun 2020-2024 sebesar Rp 9.939.799.500 atau sebesar Rp 1.987.959.900 per tahun dengan capaian realisasi rata-rata pertahun 1,297%. Hanya pada tahun 2022 realisasi capaian PAD sebesar 63,75% yang diakibatkan oleh terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Kontribusi pendapatan

asli daerah paling tinggi pada Dinas Peternakan dan Keswan bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu senilai Rp 8.4722.504.000 dengan persentase 85,23%, diikuti oleh retribusi rumah potong hewan senilai Rp 1.407.195.500 dengan persentase 14,15%, dan penjualan produk usaha daerah senilai Rp 60.100.000 atau sebesar 0,60%.

2. Sarana Prasarana Peternakan Dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan

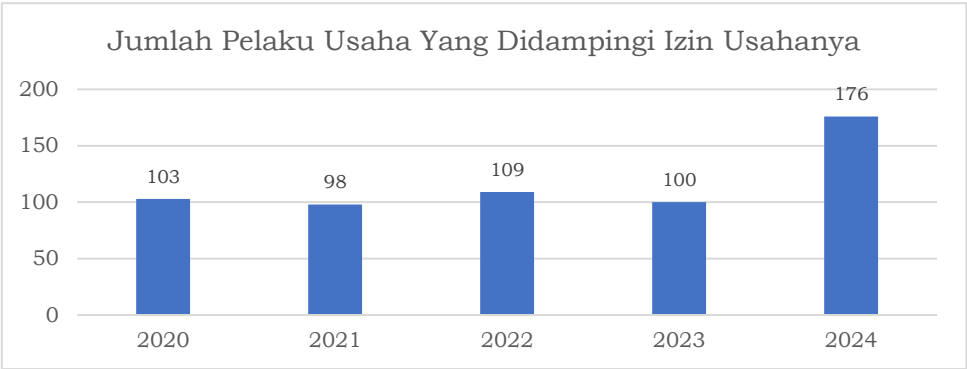
Bidang sarana prasarana dan izin usaha Peternakan melaksanakan tugas dalam rangka penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Peternakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sub sektor peternakan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengadakan dan/atau merehabilitasi 152 unit sarana prasarana Peternakan yang terdiri dari 64 unit sarana pendukung Peternakan dan 88 unit prasarana Peternakan. Dari 7 rumah potong hewan, yang telah direhab dan dilengkapi sarana pendukungnya sesuai standar teknis hanya 2 RPH. Dari 16 pusat Kesehatan hewan, telah dirahabilitasi sebanyak 11 unit. Secara umum terdapat tren kenaikan pengadaan sarana prasarana tetapi masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana yang dapat berdampak pada kurang optimalnya penggunaan sarana prasarana Peternakan yang ada.



Gambar 2.10 Jumlah Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Peternakan Tahun 2020-2024

Sampai tahun 2024, tercatat ada 176 usaha di bidang Peternakan yang telah didampingi untuk mematuhi peraturan legalitas izin usaha peternakan. Tren kenaikan ini juga dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan produk komoditas Peternakan dan kesadaran akan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sumbawa. Izin usaha yang didampingi paling banyak yaitu usaha pemeliharaan hewan sebanyak 70 unit usaha (39,77%), usaha pemotongan hewan sebanyak 69 unit usaha (39,20%), dan toko obat hewan sebanyak 37 unit usaha (21,02%).



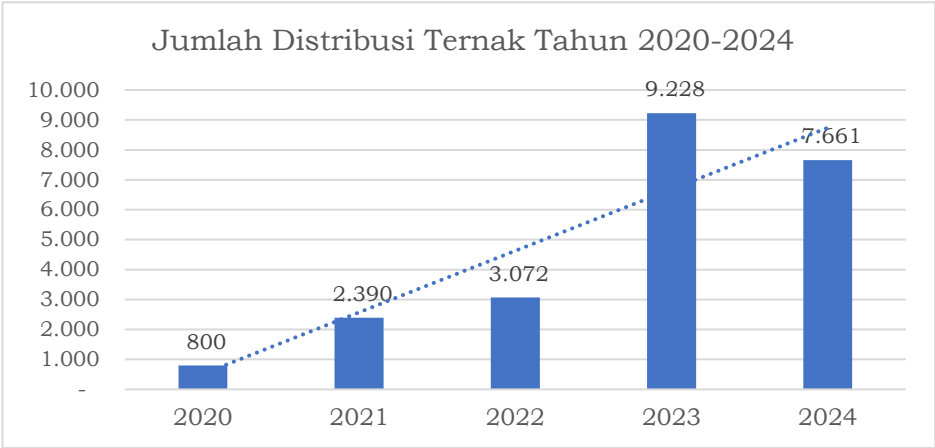
Gambar 2.11 Grafik Jumlah Pelaku Usaha yang Didampingi Pembuatan Legalitas Izin Usahanya Tahun 2020-2024

3. Perbibitan Ternak Dan Pakan

Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak serta penjaminan peredaran bibit/benih ternak.

Distribusi ternak atau peredaran bibit ternak yang dilaksanakan terdiri dari ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Komoditi ternak yang paling banyak didistribusikan dalam 5 tahun terakhir yaitu ayam sebesar 67,73% (15.680 ekor), sapi sebesar 19,52% (4.518 ekor), kambing sebesar 10,38% (2.403 ekor), bebek 0,55% (127 ekor), kerbau sebesar 0,53% (122 ekor), itik sebesar 0,39% (90 ekor), dan kuda sebesar 0,39% (50 ekor).

Alokasi anggaran terbanyak dalam 5 tahun terakhir yaitu pada pengadaan sapi dengan total nilai anggaran Rp 32.634.523.000 (78,22% dari total anggaran), diikuti kambing dengan total nilai Rp 5.146.900.000 (12,34%), ayam total nilai Rp 2.351.929.706 (5,64%), kerbau dengan total nilai Rp 1.115.600.000 (2,67%), kuda dengan total nilai Rp 415.900.000 (1,00%), entok dengan total nilai Rp 23.400.000 (0,06%), bebek dengan total nilai Rp 19.000.000 (0,05%), dan itik dengan total nilai anggaran Rp 13.500.000 (0,03%).

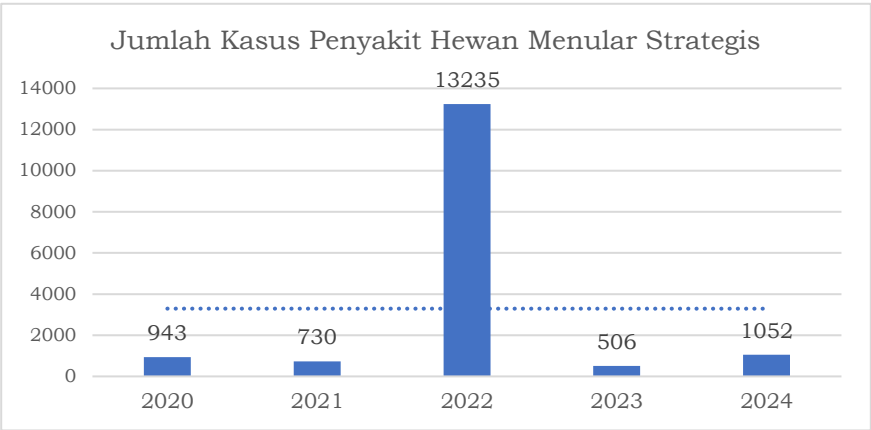


Gambar 2.12 Grafik Jumlah Ternak yang Didistribusikan Tahun 2020-2024

4. Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan 16 pusat Kesehatan hewan (Puskeswan) pada 16 kecamatan. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercatat ada 16.466 kasus penyakit hewan menular strategis dengan persentase tertinggi yaitu penyakit mulut dan kuku sebesar 77,82% atau

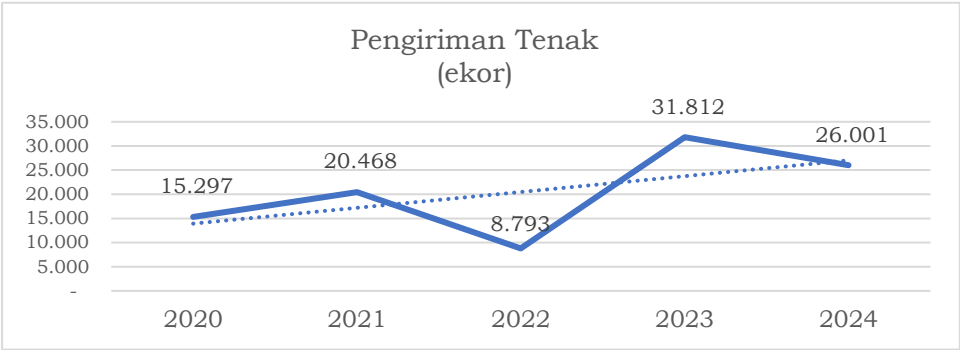
sebanyak 12.814 kasus, penyakit rabies sebesar 11,44% atau sebanyak 1.883 kasus, penyakit Septicaemia Epizootica (SE) sebesar 2,74% atau sebanyak 451 kasus, penyakit surra sebesar 0,64% atau sebanyak 106 kasus.



Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kasus Penyakit Hewan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus penyakit hewan sebesar - 22,58%, tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan 1.713% yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 46,34% dibandingkan dengan jumlah kasus PHMS pada tahun 2020. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus penyakit sebesar 107,9% yang diakibatkan oleh tingginya meningkatnya kasus penyakit hewan yang bersifat zoonosis yaitu rabies yang meningkat sebesar 346,90% dibandingkan dengan jumlah kasus rabies pada tahun 2020 (194 kasus) dan tahun 2024 867 kasus.

Rendahnya capaian persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak diakibatkan oleh cakupan pelayanan kesehatan hewan dan pengadaan obat hewan yang terbatas termasuk vaksinasi ternak.



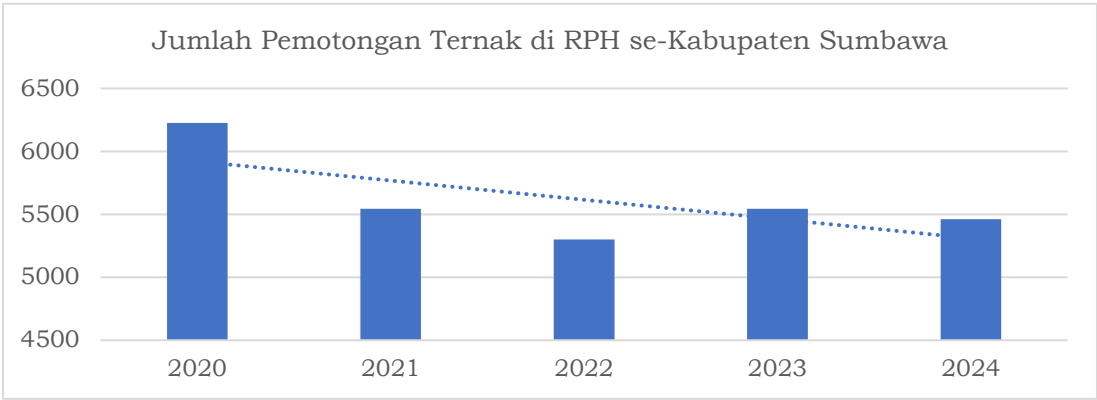
Gambar 2.10 Grafik Jumlah Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tahun 2020-2024

Pengiriman ternak besar keluar daerah Kabupaten Sumbawa adalah realisasi permintaan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke beberapa daerah sebagai mitra bisnis dalam transaksi perdagangan ternak antar pulau yang dilakukan antara pengusaha dari daerah produsen ke daerah konsumen baik dalam bentuk ternak bibit maupun ternak potong.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah produsen ternak potong, mendorong perdagangan ternak potong ke luar daerah saat ini berupa ternak hidup, diharapkan ke depan perdagangan dalam bentuk daging karena akan mempunyai dampak yang lebih bagi dinamika ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan peternak, selain itu perdagangan dalam bentuk daging dengan sistem stok dapat menutupi stagnasi produksi pada waktu-waktu tertentu. Sebaliknya pada perdagangan ternak hidup akan lebih fluktuatif seperti sekarang ini, mengingat merebaknya kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dll tahun 2022 menghambat arus perdagangan dari daerah produksi ke daerah konsumsi.

5. Kesehatan Masyarakat Veteriner

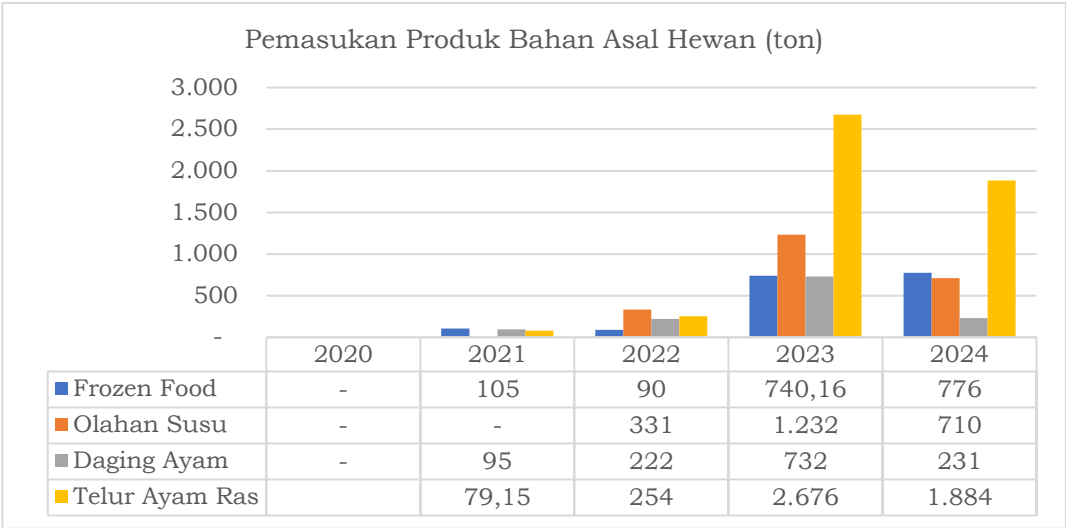
Kabupaten Sumbawa memiliki 7 Rumah Potong Hewan di bawah naungan Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah pemotongan ternak di RPH se-Kabupaten Sumbawa disajikan dalam grafik di bawah :



Grafik 2.11 Jumlah Pemotongan Ternak di RPH se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

Berdasarkan lokasi pemotongan, jumlah pemotongan tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu di Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkong dengan total pemotongan 12.672 ekor (45,13% dari total pemotongan), disusul RPH Alas dengan jumlah pemotongan 5.815 ekor (20,71%), RPH Plampang dengan jumlah pemotongan 3.327 ekor (11,85%), RPH Lopok jumlah pemotongan 1.898 ekor (6,76%), RPH Utan jumlah pemotongan 1.818 (6,48%), RPH Empang jumlah pemotongan 1.671 ekor (5,95%) dan yang terendah adalah RPH Sabang dengan jumlah pemotongan 876 ekor (3,12%).

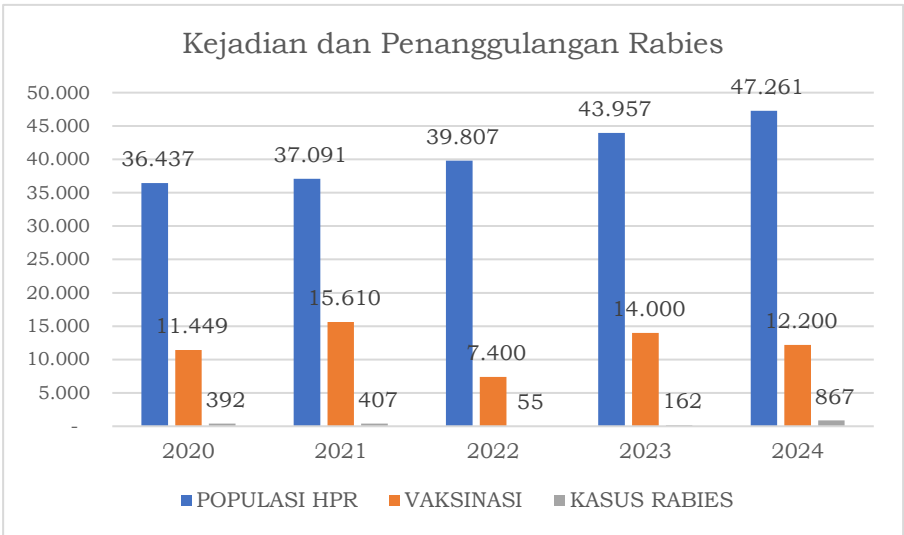
Berdasarkan komoditi ternak, ternak yang paling banyak dipotong dalam 5 tahun terakhir adalah sapi sebesar sebanyak 21.603 ekor atau 74,94% dari total pemotongan, kerbau sebanyak 7.078 atau 24,55%, dan kuda sebanyak 145 ekor atau 0,50% dari total jumlah pemotongan.



Grafik 2.12 Jumlah Pemasukan Produk Bahan Asal Hewan Tahun 2020-2024

Jumlah rekomendasi pemasukan bahan asal hewan (BAH) dari tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 612 rekomendasi dengan persentase tertinggi yaitu ayam potong segar 38,07% (233 rekomendasi), diikuti oleh telur 22,88% (140 rekomendasi), frozen food 17,97% (110 rekom), ayam potong beku 12,42% (76 rekomendasi), dan susu fermentasi 8,66% (53 rekomendasi). Tingginya pemasukan BAH merupakan usaha pemenuhan kebutuhan pangan dalam daerah dikarenakan produksi dalam daerah masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam daerah.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan atas peredaran produk hewan, bidang kesmavet juga melaksanakan kegiatan usaha penanggulangan penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau disebut juga penyakit zoonosis. Rabies merupakan salah satu penyakit menular strategis yang dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat mengancam nyawa. Usaha pencegahan penyebaran dan penularan penyakit rabies salah satunya dilakukan melalui kegiatan vaksinasi dengan target hewan penular rabies (HPR) tervaksin 70% dari total populasi untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Target tersebut belum dapat dicapai dikarenakan terbatasnya pengadaan vaksin rabies dan sarana pendukungnya.

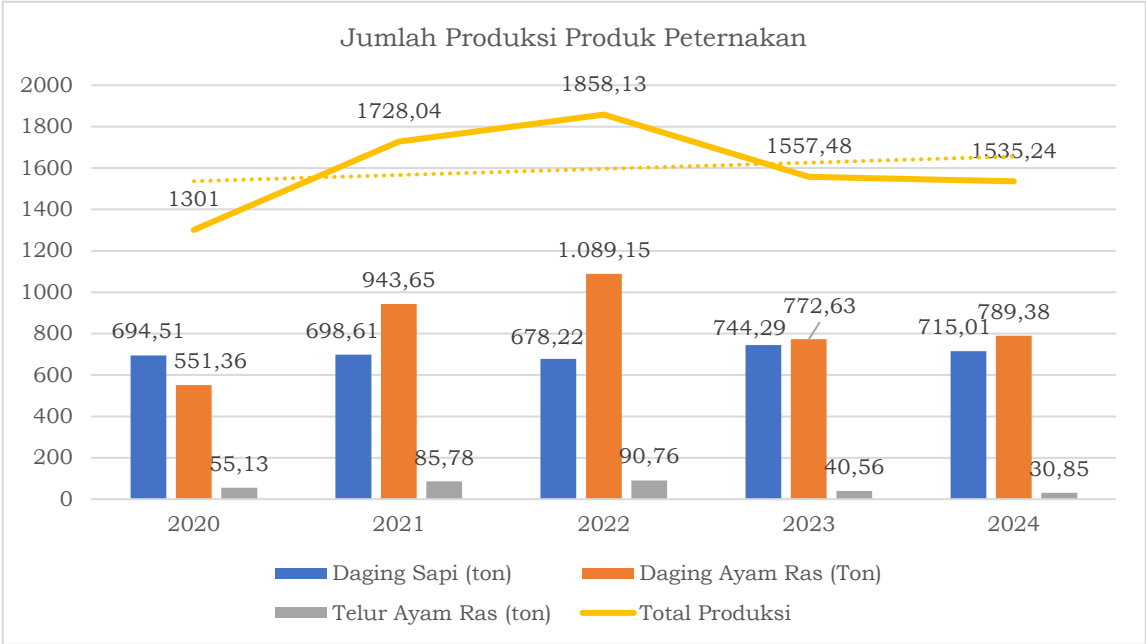


Gambar 2.13 Grafik Kejadian dan Penanggulangan Rabies Tahun 2020-2024

Jumlah kejadian kasus rabies dari tahun 2020 sampai 2024 meningkat sebesar 346,90% jumlah persentase penanganan dan penanggulangan rabies melalui kegiatan vaksinasi HPR dengan cakupan hanya 25,81%.

6. Produksi Hasil Peternakan

Komoditas peternakan utama yang sebagai penyedia kebutuhan pangan asal hewan adalah daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, data hasil produksi produk komoditi utama di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :



Gambar 2.14 Grafik Jumlah Produksi Daging Sapi, Ayam Ras, dan Telur Tahun 2020-2024

Produksi daging sapi didapatkan melalui pemotongan ternak lokal di wilayah Kabupaten sumbawa Ketersediaan daging sapi yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 101,6%. Ketersediaan ini baik dalam bentuk daging segar dan juga daging olahan yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama seperti bakso, abon dan raris.

Tingginya permintaan terhadap daging khususnya daging sapi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sumbawa dengan potensi populasi ternak saat ini kemampuan potensi ternak potong khususnya Sapi Potong rata-rata 35.000 ekor pertahun keluar daerah dengan potensi potong 50 ekor perhari dengan rata-rata bobot hidup 200 kg – 250 kg , ketersediaan ini dapat diukur secara akurat melalui sistem Aplikasi SiJINAK (e Registrasi – Data Basis Peternak dan Ternak) sehingga diharapkan Kabupaten Sumbawa dapat berkontribusi langsung dalam pemenuhan kebutuhan daging Nasional.

Produksi daging ayam ras pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, diperkirakan produksi dalam daerah saat ini hanya dapat memenuhi 47,7% dari kebutuhan daging ayam ras dalam daerah, demikian juga dengan telur produksi saat ini hanya memenuhi 12,8 % dari kebutuhan telur ayam ras.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu Peternak, Organisasi Masyarakat dan Swasta, dan Masyarakat umum.

Sebagian besar usaha peternakan di Kabupaten Sumbawa merupakan peternakan rakyat, skala usaha yang kecil, pengelolaan yang bersifat tradisional, dan seringkali menjadi bagian dari usaha rumah tangga. Peternak/RTP di kabupaten sumbawa sekitar 98.131 rumah tangga peternak atau 18,66% dari jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa.

Kelompok Tani Ternak adalah wadah bagi para peternak untuk bersatu dan meningkatkan usaha peternakan mereka. Kelompok ini berfungsi untuk berbagi informasi, teknologi, dan sumber daya, serta memperjuangkan kepentingan peternak, sehingga sasaran pemerintah daerah dalam Pendistribusian bibit ternak, sarana prasarana Pendukung menggunakan pendekatan Kelompok Tani Ternak sebagai sasaran.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Persatuan Pengusaha Peternak Hewan Indonesia (PPHANI) dan Asosiasi Pedagang Peternakan Sapi Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Unggas Sumbawa (APSUM), Asosiasi Pedagang Peternak Hewan, Asosiasi Pedagang Ayam Potong Sumbawa (ASPAS), Perhimpunan Peternak Broiler Sumbawa (PPBS) dan Asosiasi-Asosiasi lainnya, pengusaha maupun peternak merupakan Mitra layanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pemasukan atau pengeluaran ternak atau bahan asal hewan. Serta kerjasama terkait pemeriksaan sampel di laboratorium melalui *MoU* dengan Balai Besar Veteriner dalam peneguhan diagnosa penyakit hewan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran dinas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sumbawa. Berikut identifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dan dapat mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Sumbawa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
a. Pertumbuhan populasi ternak belum optimal	Pencatatan dan pengumpulan data ternak belum optimal	- Cara pengumpulan data ternak melalui registrasi ternak masih manual - Keikutsertaan peternak mendaftar ternak
	Ketersediaan daging ayam dan telur yang belum memadai	- Jumlah peternak unggas relatif masih rendah - Rendahnya produksi daging ayam dan telur dalam daerah - Ketersediaan sarana dan prasarana Peternakan unggas yang masih kurang - Kurangnya intervensi kebijakan pemerintah terhadap peternak unggas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketersediaan sarana prasana pendukung peternakan masih rendah	Pola pemeliharaan ternak tradisional	- peternak masih kurang memprioritaskan usaha ternak yang sifatnya masih sambilan - Peternak hanya mengembangkan ternak seadanya tidak untuk keperluan pasar - sebagai simbol status sosial di dalam masyarakat - sebagai aset atau tabungan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada keperluan uang yang mendesak - Skala usaha kecil
	ketersediaan bibit/bakalan terutama yang bermutu baik atau bibit unggul masih kurang	- pembibitan sapi potong sebagian besar dilakukan oleh usaha peternakan rakyat, kemampuan produksi bibitnya sangat kecil dan keunggulannya tidak terjamin karena sebagian besar memang terjadi secara alamiah - Bisnis pembibitan tidak menarik bagi investor - Terjadi inbreeding/perkawinan sedarah - Akses terhadap Inseminasi Buatan (IB) terbatas - good breeding practice belum dilaksanakan
	kekurangan pakan	- Musim kemarau yang panjang - Masih mengandalkan rumput alam - Rendahnya ketersediaan pakan hasil budidaya pakan ternak - Pemanfaatan Limbah pertanian jadi pakan olahan masih rendah
	Keterbatasan sumber daya bagi peternak	- ketrampilan serta motivasi berwirausaha untuk pengembangan usaha peternakan masih kurang - jiwa entrepreneurship yang masih rendah - kemampuan bekerjasama sangat kurang - lulusan sekolah peternakan tidak terjun bekerja ke peternakan - proses regenerasi peternak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum optimal		- kelembagaan Kelompok peternak tidak berjalan
	Keterbatasan Modal	- Belum ada investor dalam budidaya peternak dengan sistem flasma - Akses KUR Peternakan Masih Kurang - Subsidi KUR tidak 100%
	Sarana Prasarana peternakan dan Penunjang yang belum memadai	- Sarana transportasi petugas kurang - Sarana kesehatan hewan - Sarana produksi ternak terbatas - Sarana pengolahan pakan - Irigasi tanah dangkal peternakan - Jalan produksi peternakan - RPH - Puskesmas - Klinik hewan - Laboratorium
	Berkurangnya lahan pengembalaan	- Alih fungsi lahan yang awalnya padang rumput atau dataran terbuka menjadi lahan jagung, - inventarisasi lahan yang potensial untuk pengembangan ternak sapi lengkap dengan peta, kondisi Sarana prasarana yang tersedia termasuk sumber air
	daya saing produk hewan masih kurang	- akses jejaring pemasaran, inovasi, dan serta Sistem pemasaran (tata niaga) produk hewan belum efektif dan efisien - harga ditingkat peternak tidak jelas - bobot potong yang tidak optimal - Perdagangan hasil ternak keluar daerah masih dalam bentuk ternak hidup
	Kejadian Penyakit hewan yang masih tinggi	- Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan - Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) masih tinggi - Gangguan reproduksi - Pengamatan dan pengamanan penyakit hewan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		- Pelayanan kesehatan hewan
	Pemotongan ternak ruminansia betina produktif	- Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum optimal - Tidak ada dana talangan dari pemerintah
	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang belum optimal	- Potensi beredarnya produk hewan tidak ASUH - Kejadian wabah penyakit Zoonosis (rabies) - Pengamanan pos antar daerah Kabupaten - Higine sanitasi unit usaha peternakan - Pengawasan peredaran produk hewan belum optimal
c. Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	Masih belum optimalnya kinerja Perangkat daerah	- Rendahnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal - Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Bidang Peternakan

2.2.2 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang memberikan dampak pada pelaksanaan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sumbawa baik secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut :

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber daya alam dan Sumber Daya Genetik sektor peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan menyediakan pangan hewani berkualitas	Pengelolaan peternakan belum optimal	Pencemaran Lingkungan dari kegiatan pertanian	Peternakan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) seperti metana, dinitrogen oksida, karbon dioksida, dan amonia	pemenuhan memenuhi kebutuhan protein hewani (daging dan susu) masyarakat.	Usaha peternakan belum berorientasi bisnis	pertumbuhan populasi ternak yang belum optimal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
			Sumber penyebaran penyakit hewan seperti PMK dan PHMS lainnya	Wabah penyakit hewan seperti PMK, LSD, dan ASF dapat menyengsarakan masyarakat produsen dan konsumen peternakan. Fluktuasi harga produk peternakan dapat menyebabkan banyak peternak gulung tikar. Kurangnya regenerasi peternak muda dapat membuat sulitnya mencari pengganti peternak yang sudah tua. Limbah peternakan dapat menjadi isu krusial yang menyebabkan tersingkirnya peternakan di suatu daerah. Penurunan populasi ternak dapat terjadi karena produktivitas yang masih rendah	Alih fungsi dan terbatasnya lahan pengembangan Sarana Prasarana penunjang peternakan yang masih kurang Terbatasnya akses peternak terhadap modal usaha Fluktuasi harga produk peternakan Cakupan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang belum optimal	Sarana Prasarana Pendukung peternakan yang masih kurang Kasus penyakit hewan menular masih tinggi Jaminan terhadap peredaran bahan pangan asal hewan masih belum optimal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
				Peternakan dapat berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global	Terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi Pengetahuan peternakan Rendahnya kesadaran (Konsekuensi biaya tambahan dan gaya hidup santai) Ketidadaan kemitraan usaha Kebijakan yang belum komprehensif	
Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan <i>good governance</i>	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan publik.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
			Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, misalnya <i>Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators (WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index</i>).	Desain organisasi perangkat daerah masih asimetris/belum bersifat afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah		

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Pertumbuhan populasi ternak belum optimal.
2. Ketersediaan sarana prasarana pendukung peternakan masih rendah
3. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tidak optimal.
4. Pengawasan Perizinan pelaku usaha peternakan masih rendah
5. Kualitas pengelolaan kinerja dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan indikator tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran dari sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025- 2029. Penjabaran tersebut dipetakan pada tujuan dan indikator tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tabel sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya produktivitas sektor primer daerah non tambang	Meningkatnya Produksi/ Produktivitas peternakan dan kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	%	Nilai ADHK Sektor Pertanian tahun t dikurangi dengan Nilai ADHK Sektor Pertanian tahun t-1, dibagi dengan tahun t-1, dikalikan 100%. (sumber data: BPS)
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Angka	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun n
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas		Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Poin	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah		Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	%	Proporsi retribusi : proporsi jumlah realisasi retribusi PD terhadap realisasi retribusi daerah Jumlah retribusi tahun n dibagi jumlah retribusi daerah dikali 100

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sekaligus dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penilaian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah. Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya populasi ternak
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD
4. Meningkatnya Retribusi subsektor peternakan dan kesehatan hewan

Secara rinci target kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
Meningkatnya produktivitas sektor primer daerah non tambang	Meningkatnya Produksi/ Produktivitas peternakan dan kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya populasi ternak	Laju pertumbuhan populasi ternak	%	Laju Pertumbuhan Populasi : perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu Jumlah Populasi Ternak Tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kategori AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas AKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) : Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori AKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas		Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Tingkat IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu ; 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah
Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah		Meningkatnya Retribusi subsektor peternakan dan kesehatan hewan	Proporsi Retribusi sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap retribusi daerah	%	Proporsi retribusi : proporsi jumlah realisasi retribusi PD terhadap realisasi retribusi daerah Jumlah retribusi tahun n dibagi jumlah retribusi daerah dikali 100

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN						KET
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah	1	Meningkatnya Produksi/ Produktivitas peternakan dan kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		1	Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Angka	3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				2	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN		Poin	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
3	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas				3	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (%)		%	13,06	10,07	10,48	10,59	10,62	10,55	10,47	
4	Meningkatnya produktivitas sektor primer daerah non tambang				4	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)		%	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,22	1,20	
				1	Meningkatnya Populasi Ternak	1	Laju pertumbuhan Populasi Ternak	%	3,07	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN						KET
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	Kategori AKIP PD	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	
				3	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disipin ASN PD	3	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Katagori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
				4	Meningkatnya Retribusi subsektor peternakan dan kesehatan hewan	4	Proporsi Retribusi sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap retribusi daerah	%	19,41	1,69	1,55	1,41	1,29	1,17	1,04	

3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

Strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dirincikan pada tabel berikut:

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
Meningkatnya produktivitas sektor primer daerah non tambang	Meningkatnya populasi ternak	Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises.
		Penerapan digitalisasi agribisnis peternakan
		pembangunan, dan pemeliharaan prasarana pendukung peternakan. termasuk penyediaan air/irigasi , padang penggembalaan erta akses ke jalan dan fasilitas lain yang diperlukan.
		Pengendalian dan penanganan Hewan Penular Rabies (HPR)
		meningkatkan upaya menjaga kesehatan hewan dan kesehatan payarakat veteriner, melalui pencegahan pengobatan, dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan hewan dan produk hewan
		mendorong peningkatan pemahaman dan penerapan regulasi perizinan usaha peternakan
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, kursus dan bimbingan teknis sesuai kompetensi jabatan
Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah	Meningkatnya Retribusi subsektor peternakan dan kesehatan hewan	Penguatan pengelolaan retribusi daerah

Tabel 3.5 Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

3.3.1 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dalam mencapai tujuan disajikan pada tabel berikut :

TAHAP 1 (2025)	TAHAP 2 (2026)	TAHAP 3 (2027)	TAHAP 4 (2028)	TAHAP 5 (2029)	TRANSISI (2030)
Identifikasi / Pendataan komoditas, peternak, sarana prasarana pendukung , layanan keswan melalui sistem Aplikasi Sijinak dan inisiasi digitalisasi agribisnis peternakan	Pengembangan kawasan terintegrasi peternakan (Integrated Farming Sistem), pengemukan sapi (Sapi siap potong) optimalisasi Unit Pengolah pakan dan Kawasan peternakan ayam petelur dan pedaging	Peningkatan efisiensi pemasaran melalui penyederhanaan rantai tata niaga, pengembangan akses informasi pasar, penumbuhan kemitraan	Peningkatan nilai tambah produk hewan dan kerjasama antar daerah, investasi peternakan	Peternakan Maju (Ketersediaan pangan asal hewan yang cukup dan berkualitas dan penerapan digitalisasi agribisnis peternakan)	Perekonomian maju akan meninjau kembali efektivitas klaster agribisnis, kawasan industri, dan promosi investasi.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

3.3.2 Lokus Pengembangan Peternakan

pengembangan komoditas peternakan dan kesehatan hewan akan menitikberatkan relasi antara lokus potensial, obyek (ternak) dengan subyek (peternak). Untuk penentuan lokasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1. Lokasi prioritas Kawasan peternakan
- 2. Lokasi penyangga di luar Kawasan peternakan
- 3. Lokasi inisiatif lokal diinisiasi oleh Kelompok Tani Ternak, kepala desa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.

No.	Komoditi	Lokasi	Ket
1	Ayam Ras Pedaging	Alas, Alas Barat, Buer Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lab. Badas, Plampang, Ropang, Lantung Sumbawa, Empang	
2	Ayam Ras Petelur	Alas, Buer, Empang, Labangka, moyo hilir, Moyo Hulu	
3	Sapi Potong	Moyo Hilir, Plampang, Moyo Hulu, Lopok, Labangka, Lunyuk, Moyo Utara, Empang	
4	Kerbau	Empang, Lape, Lenagguar, Lape, Lopok, Maronge, moyo Hilir, Moyo Hulu, Moyo Utara, Plampang, Tarano	
5	Kambing	Lape, Lopok, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Plampang, Garano, Unter Iwes, Utan	

Tabel 3.5 Lokasi Pengembangan komodi peternakan

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua program/kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk meningkatkan layanan pada masyarakat peternakan. Keberhasilan Pengembangan peternakan sangat ditentukan oleh kebijakan yang strategis usaha peternakan yang ditempuh dijabarkan pada tabel berikut:

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Agribisnis/ peternakan	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pertanian Modern	Penyediaan Bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan	
		Pengembangan dan perbaikan mutu genetik ternak	
		Pengembangan dan penyediaan benih/bibit pakan unggul dan teknologi pakan	
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak	
		Penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi	
		Pengembangan kawasan peternakan, pembangunan/ Rehabilirasi Rumah Potong Hewan, Puskesmas, Pos IB, Unit Pengolahan Pakan, Irigasi tanah Dangkal, Jalan Produksi	
		Vaksinasi dan Eliminasi HPR	
		Pelayanan pengobatan, laboratorium, vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan, dan bahan asal hewan, higine sanitasi dan pelaporan	
		pendampingan teknis terhadap rekomendasi perijinan usaha,petertemuan dengan pelaku usaha serta, akses informasi terhadap regulasi	
		Penguatan pengelolaan sistem informasi kinerja dan SOP	

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA

4.1 Uraian Program

Program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa, maka Program Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melaksanakan 6 (enam) Program sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Meningkatnya Produksi/ Produktivitsa Agribisnis/ Pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan & Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan - Kelautan)	Meningkatnya Produksi/ Produktivitas peternakan					Laju Pertumbuhan sektor pertanian	
	Meningkatnya populasi ternak					Laju Pertumbuhan Populasi Ternak	
	Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana peternakan					1. Cakupan Sarana peralatan peternakan yang digunakan/ dimanfaatkan	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Tersusunnya laporan pengawasan penggunaan sarana peternakan					Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana peternakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
						2. Cakupan penyediaan Sarana bibit/benih ternak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
						pakan yang berkualitas	
					Tersedianya laporan jumlah bibit ternak unggul	Jumlah ternak ditingkatkan sumber daya genetik	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota
					Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
					Meningkatnya mutu dan jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan serta pakan dalam daerah	Jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang berkualitas	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota
					Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
					Tersedianya laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota
					Terlaksananya penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
					Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
					Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Meningkatnya ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai standar			Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana peternakan		Jumlah prasarana peternakan yang dibangun, direhab, dan dipelihara tahun n	Pembangunan Prasarana Pertanian
					Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Terkelolanya sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kab/Kota
					Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
				Terlaksananya Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Jumlah Luas lahan penggembalaan umum	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
					Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
			Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian non alam			Cakupan pengendalian dan penanggulangan hewan terdampak wabah penyakit ternak	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana wabah penyakit ternak		Jumlah Laporan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit ternak	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota
					Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
						Bersifat Zoonosis	
			Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			1. Cakupan pelayanan kesehatan hewan	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Tersedianya laporan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kab/Kota
					Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota
					Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
				Tersedianya laporan layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di daerah kabupaten/ kota		jumlah Laporan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota
					Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
					Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
						2. Cakupan pelayanan kesehatan Masyarakat veteriner	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terlaksananya penerapan dan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner		Jumlah laporan penerapan dan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
					Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
					Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
					Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan
			Meningkatnya kepatuhan berusaha subsektor peternakan			Tingkat Kepatuhan Perizinan pelaku usaha sub sektor peternakan (PUSSP)	PERIZINAN USAHA PERTANIAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Tersedianya laporan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, RS Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
					Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
					Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Laporan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
				Tersedianya laporan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer(Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
					Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
				Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD			
					Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD		
		Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disipin ASN PD		Indeks Profesionalitas ASN PD	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota		
			Terlaksana Administrasi Kepegawaian PD		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Kategori AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Nilai AKIP PD	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota			
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Evaluasi Kinerja PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Administrasi Keuangan PD
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Tersedianya laporan keuangan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Administrasi BMD pada PD
					Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Administrasi Umum PD
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Retribusi Daerah Subsektor peternakan		Laju Realisasi Retribusi Daerah Subsektor Peternakan	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang disusun	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD
					Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota

Program ini mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan urusan pemerintahan.

2. Program penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian

Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ketesedian

sarana peternakan dalam mendukung budidaya usaha peternakan, pada ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) dilaksanakan pendampingan pada Kelompok tani ternak terhadap sarana pengolahan pakan, Peningkatan kelahiran ternak hasil kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB), pendistribusian bibit ternak dan pakan kepada masyarakat serta pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

3. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian

Program ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung Pengembangan peternakan baik prasarana penunjang maupun prasarana pendukung seperti pembangunan irigasi tanah dangkal untuk menjamin ketersediaan air minum ternak, ketersediaan Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, Laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan, Jalan Produksi dan Unit Pengolahan Pakan Silase (UPP).

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap sektor pertanian khususnya subsektor peternakan, bencana yang disebabkan oleh penyakit hewan bersifat zoonosis yang mengancam Keselamatan manusia maupun Ketersediaan pangan asal hewan

5. Program Perizinan usaha pertanian

Program ini dilaksanakan khususnya izin peternakan untuk memfasilitasi usaha peternakan yang sesuai dengan ketentuan teknis maupun ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga pembiaanaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha sector peternakan dapat berjalan dengan baik.

6. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan sebagai upaya menekan kejadian kasus penyakit hewan Menular khususnya terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMS), melalui kegiatan vaksinasi SE dan AT pengawasan lalu lintas ternak dengan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan, pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, pendampingan pada unit-unit usaha peternakan serta Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, serta melaksanakan pendampingan pada kesejahteraan hewan pada unit usaha peternakan.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan disusun sesuai dengan hasil cascading dari tujuan, sasaran, dan outcome dengan berpedoman pada nomenklatur kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 23 kegiatan yang dijabarkan pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Uraian Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
1	Program penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pendampingan dan pengawasan pemanfaatan sarana pendukung pertanian pada kelompok tani ternak dalam bentuk pelatihan dan KIE. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh Kabupaten Sumbawa mencakup kelompok tani ternak penerima layanan. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan, dapat bekerjasama dengan mitra eksternal penyelenggara pelatihan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemanfaatan sarana pertanian dan penyebarluasan informasi tata kelola peternakan yang modern sesuai perkembangan teknologi. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah sebagai usaha peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan dalam daerah melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB). <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam mendukung usaha pelestarian sumber daya genetik hewan dan tumbuhan serta usaha meningkatkan kualitas genetik ternak. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan usaha peningkatan kualitas bibit ternak dan pakan dalam daerah. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam usaha peningkatan kualitas pakan dan ternak layak bibit yang beredar di Kabupaten Sumbawa <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
4		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini meliputi pengendalian dan pengawasan ketersediaan benih/bibit ternak dan pakan hijauan yang beredar di dalam daerah <u>Lokasi Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
		Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam mengendalikan dan mengawasi ketersediaan benih/bibit ternak dan pakan yang ada di Kabupaten Sumbawa. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkkeswan
5	Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan usaha Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana peternakan di Kabupaten Sumbawa seperti RPH, Puskesmas, sumur, unit pengolahan pakan, dan jalan produksi <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam usaha pemenuhan kebutuhan prasarana peternakan yang sesuai standar di Kabupaten Sumbawa. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkkeswan

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
6		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan usaha pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak khas Kabupaten Sumbawa <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada UPT Perbibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan UPT Perbibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam melestarikan rumpun/galur ternak Kerbau Sumbawa. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
7		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyediakan lahan penggembalaan ternak yang dikelola pemerintah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkkeswan
8	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan usaha penjaminan Kesehatan hewan dalam daerah yang dilakukan melalui penutupan dan pembukaan wilayah untuk mencegah masuknya wabah dan penyakit hewan menular ke dalam daerah <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam usaha pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkkeswan
8		Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan. Pengeluaran surat rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan demi menjamin produk yang masuk ke dalam daerah telah memenuhi persyaratan teknis sesuai regulasi yang berlaku. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat sebagai sumber pendapatan asli daerah, menjamin kesehatan dan keamanan hewan dan produk hewan yang akan keluar atau masuk dan beredar di dalam daerah, memfasilitasi kegiatan tataniaga ternak. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
10		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan jasa pemeriksaan laboratorium hewan dan pelayanan Kesehatan hewan oleh medik veteriner. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat sebagai sumber pendapatan asli daerah, pemenuhan kebutuhan pemeriksaan sampel di laboratorium hewan dan mencegah penyebaran penyakit hewan melalui pelayanan kesehatan pada hewan oleh petugas kesehatan hewan, <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
11		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan penerapan hygiene sanitasi dan peredaran hewan melalui kegiatan pemotongan, dan peredaran produk hewan melalui rekomendasi pemasukan produk asal hewan, serta pengujian sampel pada laboratorium Kesehatan Masyarakat veteriner. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini sebagai sumber pendapatan asli daerah, memberikan pendampingan, pengawasan, dan pengujian produk hewan yang beredar agar memenuhi kaidah Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) serta memenuhi persyaratan higiene sanitasi sebelum beredar di masyarakat. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
12	Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian yaitu wabah penyakit rabies. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan dan bekerjasama dengan aparat desa dan bhabinkamtibmas. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam usaha pengendalian dan penanggulangan kejadian atau wabah penyakit ternak dalam daerah, pencegahan penyakit hewan menular pada manusia. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
13		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan pemenuhan legalitas izin usaha peternakan seperti usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, usaha pemeliharaan ternak, usaha rumah sakit hewan, usaha pemotongan hewan dan pasar hewan.. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat sebagai bentuk pendampingan legalitas usaha serta pengeluaran surat rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit, pemeliharaan ternak dan pakan, izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, dan pemotongan hewan .

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
14		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan pemenuhan legalitas izin usaha Peternakan, pengecer obat hewan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan). <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkkeswan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat sebagai bentuk pendampingan legalitas usaha serta pengeluaran surat rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkkeswan
15	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkkeswan) Kabupaten Sumbawa.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Disnakkeswan setiap tahun. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
16		Administrasi Keuangan PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : menyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.
17		Administrasi BMD pada PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi BMD Disnakkeswan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.
18		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi pendapatan daeran kewenangan PD yang meliputi penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan sesuai regulasi yang berlaku. <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang terlibat :</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang dan unit pelaksana teknis pada Disnakkeswan.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Manfaat Kegiatan :</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi pendapatan daerah secara lancar dan akuntabel. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.
19		Administrasi Kepegawaian PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi kepegawaian perangkat daerah meliputi pendataan, pengusulan, pemutakhiran data, serta pelaporan pengolahan data pegawai. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi kepegawaian Disnakkeswan dalam pelaksanaan pendataan, pengusulan, pemutakhiran data, serta pelaporan pengolahan data pegawai. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.
20		Administrasi Umum PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Disnakkeswan dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.
21		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pengadaan BMD untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana prasarana operasional kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kelancaran mobilitas dan pelaksanaan teknis kegiatan seperti pelayanan, monitoring, dan kegiatan lain sesuai kondisi lapangan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan
22		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/ Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kominfotiksandi. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Disnakkeswan berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.
23		Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan pada Disnakkeswan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Disnakkeswan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Disnakkeswan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, maka uraian subkegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	c. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota	d. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	e. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan f. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak g. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
5	Pembangunan Prasarana Pertanian	h. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
6	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	i. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
7	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	j. Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum k. Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
8	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	l. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8	Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	m. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
10	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	n. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium o. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
11	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	p. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan q. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner r. Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan s. Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) t. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan
12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	u. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
13	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	v. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan w. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
14	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	x. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	y. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD z. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD aa. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD bb. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD cc. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dd. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ee. Evaluasi Kinerja PD ff. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
16	Administrasi Keuangan PD	gg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hh. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jj. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
17	Administrasi BMD pada PD	kk. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD ll. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
18	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	mm. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
19	Administrasi Kepegawaian PD	nn. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20	Administrasi Umum PD	oo. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pp. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan qq. Fasilitas Kunjungan Tamu rr. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ss. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tt. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	uu. Penyediaan Jasa Surat Menyurat vv. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ww. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yy. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan penunjang.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo, baik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib maupun penunjang, sebagaimana telah dipetakan dalam Tabel 4.2.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan urusan pemerintahan wajib dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa melalui unit kerja sedangkan sub kegiatan dilaksanakan pada perangkat daerah (internal) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan berbagai subkegiatan urusan pemerintahan wajib melibatkan berbagai pihak sebagai berikut: Pemerintah Pusat

(Kementerian Pertanian, Bappenas, BKN), Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kominfotiksandi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Desa/Kelurahan, Peternak, pengusaha peternakan. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat Subkegiatan

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatnya populasi ternak melalui usaha penyediaan, pengelolaan, pendampingan dan pengawasan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- b. Meningkatnya ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar melalui usaha pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian seperti Rumah Potong Hewan, Puskesmas, irigasi air tanah, jalan produksi, unit pengolahan pakan dan wilayah sumber bibit ternak dan pakan serta lokasi penggembalaan ternak.
- c. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan yang masuk dan beredar dalam daerah maupun keluar daerah, pembinaan dan pengawasan unit usaha produk hewan sesuai persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku, serta penyediaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- d. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui kegiatan penanggulangan bencana non alam yang bersifat menular dari hewan ke manusia (zoonosis).
- e. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha subsektor peternakan melalui pendampingan dan pengawasan terhadap legalitas usaha dan pendampingan penerbitan rekomendasi izin usaha subsektor peternakan.
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah Dinas Peternakan dan kesehatan hewan melalui tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- g. Mendukung tata kelola administrasi keuangan dan pelaporan pengelolaan retribusi perangkat daerah yang baik demi memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- i. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan daerah.
- j. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri

dan/atau dapat dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya meliputi: Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian, Bappenas, BKN), Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kominfo, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Desa/Kelurahan, Peternak, pengusaha peternakan. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.3 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
BIDANG URUSAN PERTANIAN SUB SEKTOR PETERNAKAN							30.630.011.747		29.956.410.043		31.062.021.291		35.113.664.926		40.008.891.070		45.949.313.835		53.267.379.075
	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota						11.889.974.552		14.240.817.530		14.981.480.591		16.121.953.228		17.448.664.748		18.958.032.710		20.765.309.598
				Nilai AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Poin	80,9	11.887.673.552	81,0 8	14.237.302.830	82,5	14.975.995.341	83,5	16.116.050.411	84,5	17.442.276.175	85,5	18.951.091.504	86,5	20.757.706.684
				IP-ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Poin	75,78	1.205.000	75,9	1.187.200	76,1	1.319.476	77,3	1.419.922	78,5	1.536.770	78,7	1.669.706	78,9	1.828.880
				Laju Realisasi Retribusi Daerah sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	- 19,22 %	1.096.000	3%	2.327.500	3%	4.165.774	3%	4.482.895	3%	4.851.803	3%	5.271.500	3%	5.774.034
			X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Dok ume n	11	52.240.160	11	63.015.285	15	82.171.874	15	88.427.249	15	95.704.124	15	103.982.852	15	113.895.579
			X.XX.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dok ume n	2	9.805.000	2	1.656.500	2	2.290.502	2	2.464.868	2	2.667.707	2	2.898.473	2	3.174.786

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
			X.XX.01.2.01.00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok ume n	1	2.479.800	1	19.179.750	1	20.747.545	1	22.326.962	1	24.164.298	1	26.254.590	1	28.757.451
			X.XX.01.2.01.00 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok ume n	1	468.000	1	1.222.400	1	1.349.635	1	1.452.377	1	1.571.896	1	1.707.871	1	1.870.682
			X.XX.01.2.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok ume n	1	2.646.000	1	2.635.000	1	3.026.716	1	3.257.126	1	3.525.162	1	3.830.101	1	4.195.226
			X.XX.01.2.01.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok ume n	1	714.960	1	1.105.600	1	1.312.259	1	1.412.155	1	1.528.365	1	1.660.574	1	1.818.877

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
			X.XX.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapo ran	1	2.010.000	1	2.785.600	1	3.065.277	1	3.298.623	1	3.570.074	1	3.878.897	1	4.248.674
			X.XX.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Lapo ran	4	34.116.400	4	34.430.435	4	15.023.645	4	16.167.328	4	17.497.773	4	19.011.389	4	20.823.753
			X.XX.01.2.01.00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	Data	0	-	-	4	35.356.294	4	38.047.810	4	41.178.849	4	44.740.957	4	49.006.131	
			X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dok ume n	104	10.293.554.381	103	11.468.037.600	104	11.769.110.912	105	12.665.040.315	106	13.707.274.755	107	14.892.999.947	108	16.312.755.626
			X.XX.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/ Bula n	100	10.206.448.181	99	11.299.831.092	100	11.617.567.879	101	12.501.960.993	102	13.530.775.271	103	14.701.232.667	104	16.102.707.094

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
			X.XX.01.2.02.00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Dok ume n	1	77.306.000	1	162.285.308	1	144.897.830	1	155.928.249	1	168.759.933	1	183.358.233	1	200.837.846
			X.XX.01.2.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapo ran	1	3.355.000	1	3.368.950	1	3.718.121	1	4.001.165	1	4.330.430	1	4.705.026	1	5.153.559
			X.XX.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Lapo ran	2	6.445.200	2	2.552.250	2	2.927.082	2	3.149.908	2	3.409.121	2	3.704.021	2	4.057.127
			X.XX.01.2.03 Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Dinas Petrernakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Dok ume n	1	1.155.000	1	1.157.270	2	1.287.162	2	1.385.148	2	1.499.135	2	1.628.815	2	1.784.091

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
			X.XX.01.2.03.00 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dok ume n	0		0	-	1	429.054	1	461.716	1	499.712	1	542.938	1	594.697
			X.XX.01.2.03.00 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Lapo ran	1	1.155.000	1	1.157.270	1	858.108	1	923.432	1	999.423	1	1.085.877	1	1.189.394
			X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang disusun	Lapo ran	1	1.096.000	1	2.327.500	1	4.165.774	1	4.482.895	1	4.851.803	1	5.271.500	1	5.774.034
			X.XX.01.2.04.00 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dok ume n	1	1.096.000	1	2.327.500	1	4.165.774	1	4.482.895	1	4.851.803	1	5.271.500	1	5.774.034
			X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dok ume n	1	1.205.000	1	1.187.200	1	1.319.476	1	1.419.922	1	1.536.770	1	1.669.706	1	1.828.880
			X.XX.01.2.05.00 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dok ume n	1	1.205.000	1	1.187.200	1	1.319.476	1	1.419.922	1	1.536.770	1	1.669.706	1	1.828.880

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PD		Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dok ume n	3	68.182.572	3	70.200.000	5	247.115.735	5	265.927.542	5	287.811.314	5	312.707.956	5	342.518.532
			X.XX.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	0		0	-	1	6.117.343	1	6.583.029	1	7.124.761	1	7.741.077	1	8.479.037
			X.XX.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	2	1.194.000	2	1.100.000	2	1.294.702	2	1.393.262	2	1.507.916	2	1.638.356	2	1.794.541
			X.XX.01.2.06.00 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapo ran	0		0	-	1	13.483.333	1	14.509.758	1	15.703.798	1	17.062.229	1	18.688.779
			X.XX.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	1	66.988.572	1	69.100.000	1	226.220.357	1	243.441.494	1	263.474.838	1	286.266.294	1	313.556.175
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan barang milik daerah	Unit	97	596.040.150	42	1.684.631.125	43	800.472.528	44	861.408.896	45	932.296.157	46	1.012.942.899	47	1.109.507.153
		X.XX.01.2.07.00 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	82		2	413.227.000	2	445.096.345	2	478.979.525	2	518.395.819	2	563.238.795	2	616.932.575

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
		X.XX.01.2.07.00	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	596.040.150	40	1.271.404.125	41	355.376.183	42	382.429.371	43	413.900.338	44	449.704.104	45	492.574.577
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun	Dokumen	25	687.827.245	25	767.582.850	25	820.704.248	25	883.180.766	25	955.859.682	25	1.038.544.747	25	1.137.549.636
		X.XX.01.2.08.00	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12.717.500	1	14.284.850	1	15.521.882	1	16.703.494	1	18.078.061	1	19.641.874	1	21.514.342
		X.XX.01.2.08.00	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	203.091.845	12	239.000.000	12	257.432.420	12	277.029.590	12	299.826.974	12	325.763.011	12	356.818.130
		X.XX.01.2.08.00	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	472.017.900	12	514.298.000	12	547.749.946	12	589.447.682	12	637.954.648	12	693.139.862	12	759.217.164

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
						BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Dok ume n	82	188.674.044	84	182.678.700	88	1.255.132.882	90	1.350.680.495	92	1.461.831.008	94	1.588.284.288	96	1.739.696.068
			X.XX.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	82	188.674.044	84	182.678.700	86	206.429.241	88	222.143.769	90	240.424.476	92	261.221.998	94	286.124.396
			X.XX.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0		0	-	2	1.048.703.641	2	1.128.536.726	2	1.221.406.532	2	1.327.062.290	2	1.453.571.672
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1. Cakupan Sarana peralatan peternakan yang digunakan/ dimanfaatkan	%	20,69	5.323.819.100 226.961.200	49,17	10.766.764.250 222.663.750	56,00	10.909.464.000 210.960.563	66,92	13.407.384.986 270.855.523	77,78	16.531.030.650 319.666.991	90,00	20.434.791.858 395.155.545	100,00	25.314.421.594 489.514.850
				2. Cakupan penyediaan Sarana bibit/benih ternak dan pakan yang berkualitas	%	31,7	5.096.857.900	42,67	10.544.100.500	53,63	10.698.503.437	64,59	13.136.529.463	75,56	16.211.363.659	86,52	20.039.636.313	97,48	24.824.906.744

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
			BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana peternakan	Lapo ran	4	226.961.200	4	222.663.750	8	210.960.563	8	270.855.523	8	319.666.991	8	395.155.545	8	489.514.850
3.27.02.2.01.00 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lapo ran	0		0	-	4	20.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	37.462.504	4	46.408.186
3.27.02.2.01.00 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Lapo ran	4	226.961.200	4	222.663.750	4	190.960.563	4	210.855.523	4	249.666.991	4	357.693.041	4	443.106.664
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ternak ditingkatkan sumber daya genetik	Dok ume n	12	13.693.500	12	37.020.900	12	22.361.500	12	27.483.548	12	33.884.217	12	41.885.889	12	51.887.832
3.27.02.2.02.00 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama n	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Dok ume n	12	13.693.500	12	37.020.900	12	22.361.500	12	27.483.548	12	33.884.217	12	41.885.889	12	51.887.832
3.27.02.2.03.Pening katan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang berkualitas	Lapo ran	0	0	0	0	48	10000000	48	12417986	48	15152926,53	48	18731251,93	48	23204092,88

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
	3.27.02.2.03.00 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/T anaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Lapo ran	0	0	0	0	48	10.000.000,00	48	12417986	48	15.152.927	48	18.731.252	48	23.204.093
	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Lapo ran	7797	5083164400	9012	10.507.079.600	20.0 16	10.666.141.937	20.0 16	13.096.627.930	20.0 16	16.162.326.516	20.0 16	19.979.019.172	20.0 16	24.749.814.819
	3.27.02.2.05.00 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit	Lapo ran	12	18.875.000	12	222.186.900	12	256.370.937	12	314.721.434	12	388.392.387	12	480.110.269	12	594.755.937
	3.27.02.2.05.00 08 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	lapo ran	1	5.064.289.400	1	10.284.892.700	1	10.399.771.000	1	12.761.906.496	1	15.749.252.468	1	19.468.398.730	1	24.117.263.177
	3.27.02.2.05.00 09 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Lapo ran	-		0	0	4	10.000.000,00	4	20.000.000	4	24.681.661	4	30.510.173	4	37.795.706

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar	%	31,55	10.004.085.500	38,3 5	348.353.000	50,9 7	262.416.043	62,6 2	316.789.877	74,2 7	389.662.346	85,9 2	480.752.932	100	603.813.373
	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang dibangun, direhab, dan dipelihara tahun n	Unit	25	9.994.030.500	1	204.853.000	1	118.087.219	1	142.555.445	1	175.348.056	1	216.338.819	1	271.716.018
	3.27.03.2.02.00 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	25	9.994.030.500	1	204.853.000	1	118.087.219	1	142.555.445	1	175.348.056	1	216.338.819	1	271.716.018
	3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galu r Ternak dalam Daerah Kabupaten/kot a	Lapo ran	12	10.055.000	12	143.500.000	12	104.966.417	12	126.715.951	12	155.864.938	12	192.301.173	12	241.525.349
	3.27.03.2.03.00 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galu r Ternak yang Dilestarikan dan	Lapo ran	12	10.055.000	12	143.500.000	12	104.966.417	12	126.715.951	12	155.864.938	12	192.301.173	12	241.525.349

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
	3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum	Ha	1	-	1	0	2	39.362.406	2	47.518.482	2	58.449.352	2	72.112.940	2	90.572.006
	3.27.03.2.04.00 01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	0		0	-	1	32.001.636	1	38.632.526	1	47.519.323	1	58.627.820	1	73.635.041
	3.27.03.2.04.00 03 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaa n Umum	Ha	0		0	0	1	7.360.770	1	8.885.956	1	10.930.029	1	13.485.120	1	16.936.965
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				3.399.368.095		4.240.484.075		4.493.043.557		4.794.210.184		5.099.461.648		5.463.053.263		5.896.273.387
		1. Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	25,31	3.347.163.095	27,8 4	4.118.106.875	30,6 3	4.252.000.000	33,6 9	4.626.706.885	37,0 6	4.825.884.871	40,7 6	5.169.970.462	44,8 4	5.579.949.120
		2. Cakupan pelayanan kesehatan Mayarakat veteriner	%	14,22	52.205.000	23,5 6	122.377.200	40,4 4	241.043.557	55,1 1	167.503.299	70,2 2	273.576.777	84,4 4	293.082.801	100	316.324.267
	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulanga n penyakit hewan dan zoonosis	Lapo ran	12	0	12	150.850.000	12	157.000.000	12	167.503.300	12	178.190.011	12	190.894.958	12	206.032.928

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
	3.27.04.2.01.00 08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kot a	Lapo ran	12	0	12	150.850.000	12	157.000.000	12	167.503.300	12	178.190.011	12	190.894.958	12	206.032.928
	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Ko ta	Lapo ran	12	42.042.000	12	129.730.225	12	190.000.000	12	202.711.000	12	215.643.962	12	231.019.376	12	249.339.213
	3.27.04.2.02.00 04 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Lapo ran	12	42.042.000	12	129.730.225	12	190.000.000	12	202.711.000	12	215.643.962	12	231.019.376	12	249.339.213

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
			BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Lapo ran	24	3.305.121.095	24	3.837.526.650	24	3.905.000.000	24	4.256.492.585	24	4.432.050.899	24	4.748.056.128	24	5.124.576.979
3.27.04.2.03.00 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium	Lapo ran	12	85.051.700	12	275.354.200	12	280.000.000	12	303.822.514	12	317.791.102	12	340.449.607	12	367.447.261
3.27.04.2.03.00 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lapo ran	12	3.220.069.395	12	3.562.172.450	12	3.625.000.000	12	3.952.670.071	12	4.114.259.797	12	4.407.606.520	12	4.757.129.718
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan penerapan dan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Lapo ran	19	52.205.000	19	122.377.200	3.52 7	241.043.557	3.89 6	167.503.299	4.28 8	273.576.777	4.72 0	293.082.801	5.19 3	316.324.267
3.27.04.2.04.00 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Lapo ran	12	35.850.100	12	51.677.200	12	58.543.557	12	40.682.436	12	66.445.077	12	71.182.611	12	76.827.392
3.27.04.2.04.00 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dok ume n	0		0	-	2	20.000.000	2	13.898.177	2	22.699.364	2	24.317.829	2	26.246.233

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
	3.27.04.2.04.00 05 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Lapo ran	7	16.354.900	7	70.700.000	7	87.500.000	7	60.804.524	7	99.309.719	7	106.390.502	7	114.827.269
	3.27.04.2.04.00 06 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dok ume n	0		0	-	3.50 0	15.000.000	3.85 0	10.423.633	4.23 5	17.024.523	4.65 9	18.238.372	5.12 4	19.684.675
	3.27.04.2.04.00 07 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Oran g	0		0	-	6	60.000.000	25	41.694.530	32	68.098.093	40	72.953.487	48	78.738.699
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulan n hewan terdampak wabah	%	38,05	-	70	340.956.350	70	348.625.100	70	379.537.850	70	418.146.238	70	466.372.544	70	526.619.542

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
		penyakit hewan yang bersifat zoonosis															
	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan penanggulan wabah penyakit ternak	Lapo ran	12	-	12	340.956.350	12	348.625.100	12	379.537.850	12	418.146.238	12	466.372.544	12	526.619.542
	3.27.05.2.01.00 04 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Hewan yang tanggungi yang terdampak Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Lapo ran	12	-	12	340.956.350	12	348.625.100	12	379.537.850	12	418.146.238	12	466.372.544	12	526.619.542
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat Kepatuhan Perizinan pelaku usaha sub sektor peternakan (PUSSP)	%	86,88	12.764.500	100	19.034.838	100	66.992.000	100	93.788.800	100	121.925.440	100	146.310.528	100	160.941.581
	3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Lapo ran	24	11.176.500	24	12.483.838	24	42.195.000	24	59.073.000	24	76.794.900	24	92.153.880	24	101.369.268

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
				BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALI SASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
	3.27.06.2.02.00 03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Lapo ran	12	5.908.500	12	7.305.750	12	23.241.000	12	32.537.400	12	42.298.620	12	50.758.344	12	55.834.178
	3.27.06.2.02.00 05 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Laporan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Lapo ran	12	5.268.000	12	5.178.088	12	18.954.000	12	26.535.600	12	34.496.280	12	41.395.536	12	45.535.090
	3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Lapo ran	12	1.588.000	12	6.551.000	12	24.797.000	12	34.715.800	12	45.130.540	12	54.156.648	12	59.572.313
	3.27.06.2.03.00 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Lapo ran	12	1.588.000	12	6.551.000	12	24.797.000	12	34.715.800	12	45.130.540	12	54.156.648	12	59.572.313
TOTAL					31.687.022.262		29.956.410.043		31.062.021.290		35.113.664.926		40.008.891.070		45.949.313.835		53.267.379.075

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yaitu “Ternak Unggas Maju dan Bersaing”. Program prioritas tersebut terintegrasi dalam program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang relevan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uraian Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA
X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota			Nilai AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			IP-ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Laju Realisasi Retribusi Daerah sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun
		X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD
		X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD
		X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan PD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD
	X.XX.01.2.03 Administrasi BMD pada PD		Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun
		X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD
		X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD
	X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang disusun
		X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PD		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD
		X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PD		Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan barang milik daerah
		X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun
		X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda
		X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			1. Cakupan Sarana peralatan peternakan yang digunakan/ dimanfaatkan
			2. Cakupan penyediaan Sarana bibit/benih ternak dan pakan yang berkualitas

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana peternakan
		3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ternak ditingkatkan sumber daya genetik
		3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang berkualitas
		3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit
		3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar
		3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang dibangun, direhab, dan dipelihara tahun n
		3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/kota
		3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Luas lahan penggembalaan umum
		3.27.03.2.04.0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan
		3.27.03.2.04.0003 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			1. Cakupan pelayanan kesehatan hewan
			2. Cakupan pelayanan kesehatan Masyarakat veteriner
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
		3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA
		Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Laporan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
		3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium
		3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah laporan penerapan dan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner
		3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
		3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi
		3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM
		3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Cakupan pengendalian dan penanggulangan hewan terdampak wabah penyakit hewan yang bersifat zoonosis
	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit ternak
		3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Hewan yang tanggulasi yang terdampak Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Tingkat Kepatuhan Perizinan pelaku usaha sub sektor peternakan (PUSSP)
	3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
		3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi
		3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Laporan Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi
	3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR KINERJA
		3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju pertumbuhan Populasi Ternak	Persen (%)	3,07	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam pedaging, ayam petelur dan itik)
2.	Kategori AKIP PD	Kategori Nilai	A	A	A	A	A	A	A	LHE Inspektoralat
3.	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Nilai IP-ASN
4.	Proporsi Retribusi sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap retribusi daerah	Persentase (%)	19,41	1,69	1,55	1,41	1,29	1,17	1,04	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI PD	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Poin	80,90	81,08	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50	
2	IP-ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Poin	75,78	75,90	76,10	77,30	78,50	78,70	78,90	
3	Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	-19,22	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
4	Cakupan Sarana peralatan peternakan yang digunakan/ dimanfaatkan	Persen (%)	20,69	49,17	56,00	66,92	77,78	90,00	100,00	
5	Cakupan penyediaan sarana bibit/ benih ternak dan pakan berkualitas	Persen (%)	31,70	42,67	53,63	64,59	75,56	86,52	97,48	
6	Tingkat ketersediaan prasarana peternakan sesuai standar	Persen (%)	31,55	38,35	50,97	62,62	74,27	85,92	98,54	
7	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen (%)	25,31	27,84	30,63	33,69	37,06	40,76	44,84	
8	Cakupan pelayanan kesehatan Masyarakat veteriner	Persen (%)	14,22	23,56	40,44	55,11	70,22	84,44	100,00	
9	Cakupan pengendalian dan penaggulangan hewan yang terdampak wabah penyakit ternak	Persen (%)	38,05	70	70	70	70	70	70	
10	Tingkat Kepatuhan Perizinan pelaku usaha sub sektor peternakan (PUSSP)	Persen (%)	86,88	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang diturunkan dalam Program Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, disusun dengan mempertimbangkan potensi dan masalah sumber daya perangkat daerah, serta isu strategis global, nasional dan regional.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”. Maksudnya adalah Kabupaten Sumbawa dibangun dengan sumberdaya yang unggul melalui perekonomian yang maju untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu: Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul; Pemerintahan dan Birokrasi Unggul; Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul; Perekonomian Maju; dan Masyarakat Sejahtera. Visi dan misi tersebut secara linier direalisasikan melalui 6 (enam) Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan evaluasi

Kaidah pelaksanaan yang bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Hal ini ditujukan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, serta agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terdapat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kerangka RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak terkait (Stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap unit kerja berkewajiban mensinergikan seluruh kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Renstra ini.
3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

4. Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
5. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Unit Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.

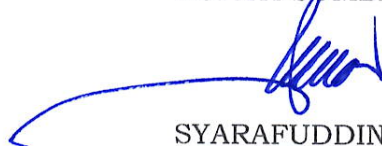
5.3 Kaidah Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT